

PERUBAHAN KELEMBAGAAN DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA LAUT TRADISIONAL (KASUS KELEMBAGAAN SASI DI KAIMANA)

The Dynamics of Sasi in Kaimana: the Institutional Change over Traditional Marine Resource Management

Ratna Patriana^{*)}, Soeryo Adiwibowo, Rilus A. Kinseng, dan Arif Satria

Program Studi Sosiologi Pedesaan, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor

^{*)}E-mail: patriana.ratna@gmail.com

ABSTRACT

Sasi, as a regime of common (pool) resource management, has long been trusted as one of the most efficient traditional practices in maintaining the sustainability of resources in coastal areas. However, the practice of Sasi was highly influenced by adat, customary laws set by feudal system that have been replaced by the modern state. This research intended to examine (1) how the practice of Sasi has changed along with the ecological, social, and economic changes that happened within the society, and (2) what was the impact of this change to the mechanism of the distribution of wealth within the local community. Field research was conducted in the Kaimana District, West Papua Province, from November - December 2015, using qualitative methods and progressive contextualization strategy. The results indicated that the economic changes were the main driving factor of the dynamic of Sasi in Kaimana. The commercialization of Sasi by village elites has replaced this tradition of marine conservation and its orientation with the mechanism of surplus accumulation. It degraded the social security mechanism, affected the income of the community in general, and developed intimate exclusion of the sub-ordinate groups, including women.

Keywords: coastal resource, social change, social security, intimate exclusion.

ABSTRAK

Sasi, sebagai suatu rezim pengelolaan sumberdaya alam milik bersama, telah lama dipercaya sebagai salah satu praktek tradisional yang efisien dalam memelihara kelestarian sumberdaya di wilayah laut. Namun demikian, praktek Sasi ini sangat dipengaruhi oleh adat yang didirikan oleh sistem feodal, suatu sistem yang kini telah digantikan oleh pemerintahan modern. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan (1) bagaimana praktek Sasi telah berubah sejalan dengan perubahan ekologi, sosial dan ekonomi yang terjadi di masyarakat, dan (2) bagaimana dampak perubahan tersebut terhadap mekanisme distribusi kemakmuran di dalam komunitas. Studi lapangan dilakukan pada November – Desember 2016 di Kabupaten Kaimana, Papua Barat, dengan menggunakan metode kualitatif dan strategi penelitian *progressive contextualization*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan ekonomi adalah yang paling berpengaruh terhadap dinamika Sasi di Kaimana. Komersialisasi Sasi oleh elit desa telah menggeser tradisi konservasi laut serta orientasinya dengan mekanisme akumulasi surplus bagi rumah tangga. Hal ini menyebabkan tergedrasinya mekanisme jaminan sosial masyarakat secara umum, dan menimbulkan *intimate exclusion* terhadap kelompok sub-ordinat, termasuk perempuan.

Kata kunci: sumberdaya laut, perubahan sosial, jaminan sosial, eksklusif karib.

PENDAHULUAN

Wilayah Perairan Kabupaten Kaimana, di Provinsi Papua Barat adalah bagian penting dari ‘Segitiga Terumbu Karang’ (*Coral Triangle*) yang kaya akan keragaman sumberdaya laut. Berdasarkan peruntukan Kawasan Perlindungan Laut (*Marine Protected Area* atau MPA) di bawah Peraturan Bupati Kaimana No. 4/2008 didirikan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) seluas 597.747 hektar di Kaimana yang dihitung sejauh 4 mil laut dari garis pantai pulau terluar. Di wilayah ini juga dilakukan kegiatan konservasi sumberdaya laut tradisional yang dikenal dengan Sasi. Sasi merupakan sistem kepercayaan, aturan-aturan dan ritual yang melibatkan larangan temporer bagi penggunaan sumberdaya atau wilayah tertentu (Adhuri 2013). Harkes dan Novaczek (2002) menjelaskan larangan temporal dan spasial ini meliputi larangan atas pemanenan komoditas tertentu, menebang pohon atau mengambil produk lainnya dari hutan, zona pasang surut atau wilayah laut dari suatu desa.

Sasi di wilayah laut (*Sasi Laut*) selain mengatur waktu dan

wilayah Sasi, diatur juga penggunaan alat tangkap dan komoditas yang dilindungi. Berbagai studi menunjukkan bahwa larangan penangkapan secara periodik efektif menjaga ketersediaan sumberdaya laut, sehingga memberikan manfaat tidak hanya secara ekologis, namun juga manfaat sosial dan ekonomi bagi nelayan lokal (misalnya, Boli *et al.* 2014) karena menyediakan akses reguler pada sumberdaya bagi masyarakat (Cohen dan Foale 2013) sehingga dalam situasi yang tepat dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan-tujuan pengelolaan sumberdaya perikanan berkelanjutan.

Sasi, sebagai suatu praktek pengelolaan sumberdaya tradisional, telah dilakukan secara turun-temurun di berbagai wilayah di Maluku dan beberapa wilayah di sebelah Barat Papua. Terdapat perbedaan mengenai asal-muasal kata Sasi, namun pada intinya adalah larangan atau tabu dalam penggunaan suatu bagian lahan, pohon ataupun laut, selama periode tertentu (von Benda Beckmann, *et al.* 1992). Di Kaimana, praktek Sasi Laut juga dikenal sebagai “*Nggama*” yang meliputi larangan penangkapan teripang, kerang lola dan batulaga.

Isu kritis Sasi yang terjadi baik di wilayah Maluku maupun Papua telah disampaikan melalui berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa asal mula dan dinamika Sasi yang dilatarbelakangi oleh situasi ekonomi sosial politik yang terjadi. Pembahasan atas dinamika Sasi sebagai suatu konstruksi sosial sejak masa kolonial hingga masa environmentalisme salah satunya dijabarkan dalam Zerner (1994). Sasi dinyatakan sebagai sebuah produk konstruksi intelektual yang perkembangannya tidak terlepas dari kepentingan-kepentingan para aktor, namun juga merupakan suatu aksi kreatif yang responsif terhadap diskusi nasional dan regional mengenai kekuatan politik, kewarganegaraan, identitas dan praktek kebudayaan lokal. Von Benda-Beckmann, *et al.* (1992) menyebutkan bahwa Sasi selalu menjadi bagian dan dibentuk oleh organisasi budaya, keagamaan dan sosial-politik yang lebih luas dari masyarakat desa, dan telah mengalami perubahan selama 400 tahun terakhir. Perubahan tersebut mulai dari ritual perlindungan sumberdaya komunal terhadap sumberdaya privat dan bersama yang diatur melalui rezim kontrol agro-ekologi pemerintah, hingga suatu cara komersialisasi dan privatisasi besar-besaran untuk menghindari pencurian. Berbagai perubahan dalam Sasi ini pada akhirnya berdampak pada pelemahan ataupun penguatan Sasi sebagai suatu lembaga yang dipercaya dalam mengelola sumberdaya alam secara berkelanjutan (Zerner 1994; Harkes dan Novaczek 2002; McLeod *et al.* 2009). Lebih jauh, Adhuri (2013) menambahkan aspek tenurial sebagai isu penting dalam kajian Sasi, yaitu konsep *petuanan*, yang terkadang justru menjadi problematika utama karena adanya multi-interpretasi dalam narasi historis atas hak tenurial tradisional yang seringkali terjadi.

Rumusan Masalah

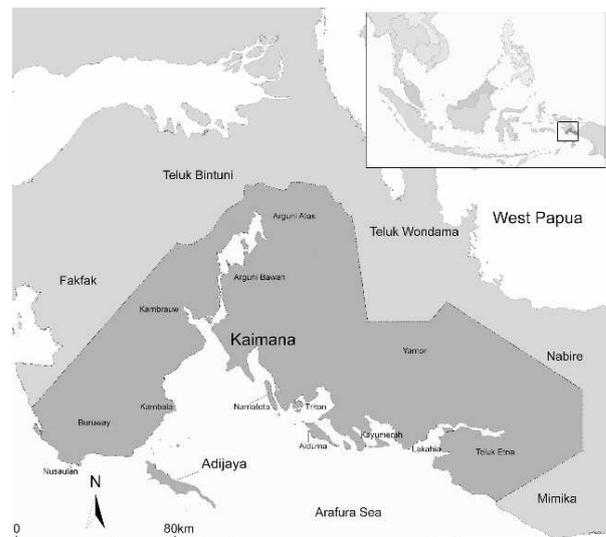
Sasi di Kaimana, atau disebut juga sebagai *Nggama*, keberadaannya berkaitan erat dengan peran dua kerajaan yang berdiri di wilayah tersebut, yaitu Kerajaan Sran dan Kerajaan Namatota. Hal ini menjadikan besar kemungkinannya bahwa penegakan aturan-aturan yang berkaitan dengan Sasi hingga kini adalah sisa-sisa dari berlakunya sistem feodalisme di masa lampau yang menciptakan kelompok-kelompok sosial yang berbeda dengan akses yang berbeda pula terhadap sumberdaya alam. Oleh karenanya, bagaimana kelembagaan dan praktek Sasi mengalami perubahan dari waktu ke waktu ke bawah perkembangan zaman yang semakin mengikis nilai-nilai feodalisme menarik untuk dipahami, sehingga kemudian dapat dilihat apakah praktek Sasi ini masih menjadi sebuah praktek yang dapat menjamin kehidupan ekonomi masyarakat melalui pola pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan.

Tujuan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk (1) menguraikan perubahankelengkapan Sasi sebagai akibat perubahan ekologi, sosial dan ekonomi, serta (2) dampaknya terhadap mekanisme distribusi kemakmuran di dalam masyarakat. Kelembagaan yang dimaksud dalam penelitian ini mengacu pada definisi kelembagaan sebagai “*a set of rules that structure social interactions in particular ways*” (Knight 1992:2).

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan selama dua bulan pada bulan November – Desember 2015 di Kampung Adijaya, Distrik Buruway, Kabupaten Kaimana, Papua Barat dan Kota Kaimana (Gambar 1). Kampung Adijaya merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Kerajaan Sran yang berpusat di Kota Kaimana dan



Gambar 1. Wilayah Penelitian, Kabupaten Kaimana, Papua Barat (Dimodifikasi dari Peta Administrasi Kabupaten Kaimana, RTRW Kab. Kaimana 2012-2013)

hingga kini masih berperan dalam mengatur urusan-urusan di dalam masyarakat yang berkaitan dengan adat istiadat, termasuk di antaranya aturan-aturan mengenai Sasi.

Paradigma kritis digunakan dalam penelitian dengan tujuan untuk mengungkap adanya hegemoni, dominasi maupun eksploitasi yang terjadi antara kelas dominan dan kelas yang subordinat. Strategi penelitian yang digunakan adalah *progressive contextualization* yaitu dengan menempatkan aktivitas masyarakat yang signifikan atau interaksi masyarakat dengan lingkungan pada konteks yang secara progresif lebih luas dan lebih kompleks (Vayda 1983). Jenis data yang dikumpulkan pada penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, melalui wawancara mendalam, observasi, studi literatur dan diskusi kelompok terarah.

Informan dipilih secara *purposive* dengan pertimbangan tujuan untuk mengungkap adanya ketimpangan kekuasaan yang terjadi di dalam masyarakat. Unit analisis penelitian adalah rumah tangga nelayan, sehingga fokus penelitian berawal pada rumah tangga elit dan rumah tangga non-elit. Analisis dalam dinamika Sasi, melibatkan informan yang lebih luas, termasuk informan kunci yaitu tokoh adat, anggota keluarga kerajaan, dan informan lainnya yaitu pihak pemerintah daerah dan NGO. Data dianalisis menggunakan model interaktif Huberman dan Miles (1984 dalam Huberman dan Miles 2009), dan metode triangulasi. Model interaktif melibatkan tiga sub-proses analisis data yang saling terkait, yaitu reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Teknik ini diperkuat dengan metode triangulasi yang bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan interpretasi serta memperkuat validitas data kualitatif. Cara ini mengacu pada penggunaan sejumlah metode penelitian berbeda untuk menguji hasil temuan, mengingat setiap metode penelitian memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing (Babbie 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Ekosistem Laut Kaimana

Kaimana berada di bagian Selatan bentang alam pesisir Papua Barat yang dikenal dengan sebutan *Bird's Head Seascape* atau disingkat BHS. Hasil riset yang dilakukan oleh Allen dan Erdmann (2009) untuk wilayah BHS sendiri terdapat 1.511

spesies ikan karang, dan sebanyak 995 di antaranya terdapat di sepanjang perairan Fakfak-Kaimana. Survey mengenai kekayaan laut wilayah BHS sebelumnya juga pernah dilakukan salah satunya oleh Conservation International (CI), sebuah lembaga NGO Internasional yang bergerak di bidang perlindungan keanekaragaman hayati. Melalui *MarineRAP* (Rapid Assessment Program) di tahun 2006, CI menemukan bahwa wilayah perairan Kaimana memiliki biomassa ikan karang tertinggi di Asia Tenggara, yaitu sebesar 228 ton per kilometer persegi, dan setidaknya terdapat 232 jenis ikan karang bernilai ekonomi yang terdapat di perairan Kaimana, sehingga menjadikan kegiatan mencari ikan di laut sebagai tumpuan hidup banyak penduduk Kaimana.

Kegiatan pencarian ikan di Kaimana sangat bergantung kepada kondisi iklim yang mempengaruhi siklus angin. Terdapat dua siklus angin yang mempengaruhi kegiatan pencarian ikan di Kaimana, yaitu Angin Timur dan Angin Barat. Kegiatan pencarian ikan pada dasarnya berlangsung sepanjang tahun, namun pada musim Angin Timur sekitar bulan Januari hingga Oktober banyak ikan-ikan bernilai ekonomi yang bermunculan, seperti hiu, cakalang dan tenggiri. Meskipun demikian, pada musim Angin Timur terutama mendekati puncak musim yaitu di bulan Agustus hingga pertengahan Oktober resiko melaut tinggi akibat sering terjadinya angin puting beliung, atau *butuh angin*. Musim Angin Barat (November hingga Januari) laut relatif teduh, meski pada bulan November kadang terjadi *butuh angin* yang cukup berbahaya namun dengan frekuensi yang sangat rendah, yaitu hanya satu atau dua kali saja. Musim Angin Barat ini juga merupakan bulan-bulan dimana kegiatan *Buka Sasi* dilakukan oleh masyarakat Kaimana.

Trajektori Perubahan Kelembagaan Sasi

Pra-kolonial

Sasi di masa pra-kolonial mengarah pada definisi perlindungan sumberdaya dari pencurian: "*ways of protecting and controlling the exploitation of their natural resources*" (Von Benda-Beckmann, *et al.* 1992: 8). Praktek ini pada umumnya melibatkan ritual-ritual, kepercayaan kepada leluhur dan kekuatan supranatural untuk mencegah dilakukannya pelanggaran-pelanggaran. Namun kepercayaan pada kekuatan supranatural ini kemudian berubah sejalan dengan masuknya ajaran agama Islam dan Kristen antara abad ke-15 dan ke-16, sehingga banyak komponen kepercayaan tradisional (kepada roh-roh dan leluhur) digantikan dengan kepercayaan kepada Tuhan monoteisme. Selain itu, terdapat pula perubahan dalam komponen kelembagaan Sasi pasca masuknya ajaran agama. Mantjoro (1996) menyebutkan bahwa pada masa kepercayaan pantheisme, regulasi ditetapkan berdasarkan kepercayaan tradisional. Namun ketika ajaran agama semakin meluas, terutama pada permulaan abad ke-18, banyak dari kepercayaan-kepercayaan supranatural yang ada sebelumnya tersebut dihilangkan, dan di berbagai wilayah peran pemimpin keagamaan dalam mengontrol Sasi menjadi lebih kuat.

Hal yang juga berperan dalam mendukung berjalannya Sasi selama berabad-abad adalah manfaat dari institusi Sasi dalam menjaga keutuhan masyarakat, sebagaimana disebutkan dalam tulisan Von Benda-Beckmann *et al.* (1992: 15) "*an institution to manage the village's natural resources and to guarantee equitable distribution of communal products*". Di dalam tulisannya yang lain, von Benda-Beckman dan von Benda-Beckman (1988) memperkenalkan suatu konsep yang disebut *social security mechanism* atau jaminan sosial yang didefinisikan sebagai berbagai relasi dan interaksi sosial

yang terjadi di masyarakat, baik antara individu, keluarga, maupun organisasi, yang dapat memobilisasi bantuan ketika mereka menghadapi masa-masa sulit. Mengacu pada definisi ini, berbagai karakteristik dan fungsi yang melekat pada kelembagaan Sasi dengan demikian dapat pula disebut sebagai suatu mekanisme jaminan sosial.

Kolonial

Perubahan yang terjadi pada masa kolonial (mulai dari Portugis, Inggris dan Belanda) terutama terkait dengan politik perdagangan dan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah yang berkuasa di masa tersebut. Di beberapa desa di Maluku, pada akhir abad ke-19 berbagai regulasi dan keterlibatan pemerintah desa pada praktek Sasi bahkan dilarang/dihilangkan namun beberapa desa lainnya sanksi atas penegakannya justru ditingkatkan (von Benda-Beckmann *et al.* 1992). Zerner (1994) melihat hal ini sebagai suatu bentuk kodifikasi aturan adat yang dilakukan oleh pemerintah kolonial sebagai upaya untuk mengontrol produksi dan mengelola hasil komersil dari kegiatan pertanian dan perikanan untuk menghasilkan keuntungan bagi elit desa dan pemerintah. Argumen ini diperkuat dengan pernyataan Peluso dan Vandergeest (2001) bahwa di bawah kolonialisme, berbagai produk 'hutan' dan 'rimba' baik kayu maupun non-kayu (seperti rotan, resin, buah-buahan, dan sebagainya) adalah penting bagi pendapatan, pekerjaan dan penggunaan pemerintah kolonial, sehingga pada masa tersebut banyak dilakukan sejumlah kegiatan pengaturan dan perundangan yang ditujukan untuk mengontrol hutan dan mendisplinkan populasi.

Pasca-kemerdekaan

Meski ide mengenai kedaulatan negara atas lahan hutan di wilayah Asia Tenggara telah ada sejak abad ke-19, institusi 'hutan negara' di beberapa negara di Asia Tenggara baru terbangun setelah Perang Dunia ke-2 (Peluso dan Vandergeest 2001). Berakhirnya Perang Dunia ke-2 ini diikuti dengan babak baru pemerintahan Indonesia pasca kemerdekaan, dimana rezim pengelolaan sumberdaya alam oleh negara dimulai dengan adanya Undang Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 yang menyebutkan bahwa "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Hal inilah yang kemudian menjadi titik tolak bagi perubahan di babak berikutnya (orde baru) ketika kewenangan pemerintah pusat atas lahan dipergunakan sebagai dasar pemberian hak-hak pengelolaan kepada pihak-pihak yang dipandang mampu menggerakkan roda ekonomi nasional secara pesat.

Orde Baru

Periode Orde Baru yang dimulai pada 1970-anditandai dengan upaya eksploitasi besar-besaran atas sumberdaya alam untuk pertumbuhan ekonomi. Mantjoro (1996) menyebut bahwa masa Orde Baru merupakan masa pergeseran orientasi pemerintahan nasional yang menjadi tajam ke arah pertumbuhan ekonomi sehingga pemerintah meluaskan kekuasaannya hingga ke pengaturan perilaku ekonomi masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya alam. Harkes dan Novaczek (2002: 252) dengan tegas menyebutkan: "*The 1970s, at the eve of the introduction of the new formal government structure, was one period of decline of Sasi.*"

Pendapat Harkes dan Novaczek sejalan dengan Zerner (1994) yang berargumen terdegradasinya Sasi di masa Order Baru merupakan buah kebijakan pertumbuhan ekonomi yang

dilakukan oleh pemerintah. Disebutkan dalam tulisannya bahwa pada masa orde baru, ketika hutan desa secara total dialokasikan (*'kavelin'*) pada perusahaan-perusahaan melalui HPH (Hak Penguasaan Hutan), pada saat yang sama praktek *Sasi Hutan* hilang dari masyarakat. Studi yang dilakukan oleh Zerner juga menyebutkan bahwa di beberapa wilayah petuanan laut telah dilakukan pengalihan/penjualan hak penguasaan kepada perusahaan. Jika terus dibiarkan fenomena ini dapat menjadi potensi konflik kedepannya, mengingat penguasaan tenurial atas petuanan laut pada dasarnya memang sudah problematik, sebagaimana digambarkan oleh Adhuri (2013). Pertentangan antara satu marga dengan marga lainnya terkait hak penguasaan laut akan semakin parah jika pengalihan hak tersebut dilakukan atas nama satu marga kepada pihak komersil.

Pasca Orde Baru

Harkes dan Novaczek (2002) menyebutkan terdapat tiga ancaman utama terhadap Sasi di masa kini, yaitu komersialisasi, modernisasi dan lunturnya nilai-nilai tradisional. Sebagai dampaknya, di wilayah Maluku Tengah, semakin banyak desa-desa yang mulai meninggalkan praktek Sasi. Sasi yang kini masih bertahan pun kini memiliki bentuk kelembagaan dan kepemimpinan yang berbeda-beda. Hal ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh McLeod et al. (2009) di Raja Ampat, yang menunjukkan bahwa Sasi telah berevolusi dari suatu institusi yang diatur dan ditegakkan oleh pemimpin tradisional, kini menjadi suatu institusi yang diatur oleh kombinasi dari pemimpin tradisional, pemimpin gereja dan pihak pemerintah lokal.

Mony (2015) menyebutkan bahwa pengaruh relasi kekuasaan yang bekerja baik pada aras internal maupun eksternal cenderung melemahkan praktek Sasi Laut di Pulau Haruku, Maluku Tengah. Relasi kekuasaan yang bersifat konfrontatif antara kewanang¹ adat dan kepemimpinan gereja, menunjukkan bahwa perpindahan kewenangan atas Sasi dari Sasi Adat/ Sasi Negeri kepada Sasi Gereja maupun sebaliknya, selalu menimbulkan kontestasi yang berujung pada pelemahan institusi Sasi tersebut. Demikian pula ketika relasi kekuasaan yang bersifat kolaboratif terjadi antara kewanang adat dengan pihak luar seperti LSM, perguruan tinggi dan lembaga donor, yang terjadi justru adalah timbulnya sentralisasi ketokohan dan kapitalisasi pemberdayaan, yang juga semakin memperlemah Sasi.

Terjadinya komersialisasi Sasi juga ditunjukkan dengan dilakukannya sistem lelang Sasi sebagaimana disebutkan dalam Harkes dan Novaczek (2002) serta Mony (2015). Meski demikian sistem jual-beli maupun lelang Sasi ini pada dasarnya telah muncul sejak akhir tahun 1880-an sebagaimana dilaporkan oleh Volker (1921 dalam von Benda-Beckmann et al. 1992) dan biasanya terjadi pada desa-desa yang mayoritas beragama Islam. Sistem lelang ini di Maluku dikenal sebagai *Sasi Babalian* atau *Sasi Lelang*, dan merupakan suatu bentuk privatisasi atas sumberdaya komunal.

Sasi: Rezim Pengelolaan *Common (Pool) Resources* Sumberdaya Hayati Laut

Keberadaan Sasi berkaitan dengan penguasaan wilayah tenurial laut, yang dikenal sebagai petuanan. Di Pulau Adijaya wilayah petuanan terbagi menjadi lima, yaitu petuanan fam Aituruaw, petuanan fam Laturauw, Seninggirauw, Samay dan Sawoka. Berdasarkan narasi sejarah, pada dasarnya semua 1 Pemimpin adat yang berwenang dalam menjaga, mengontrol dan menegakkan Sasi di Maluku dan sebagian wilayah di Papua.



Gambar 2. Peta Pulau Adijaya, Indonesia (Sumber: Penelitian Lapangan Nov-Des 2015)

wilayah Pulau Adijaya, baik darat maupun laut, adalah milik keluarga kerajaan yaitu fam Aituruaw yang kini tinggal di Kota Kaimana. Di masa lampau wilayah ini, kecuali Pulau Kilimala, dipercayakan kepada empat fam untuk dijaga, yaitu Laturauw, Seninggirauw, Samay dan Sawoka. Kini, keempatfam tersebutlah yang menguasai petuanan-petuanan di sekitar Pulau Adijaya dimana Sasi diberlakukan. Batas-batas petuanan tersebut meliputi (Gambar 2):

Wilayah petuanan merupakan *common (pool) resource* yang keberadaan dan penggunaannya dikelola oleh kelompok (fam) yang memiliki otoritas untuk mengeksklusikan orang di luar kelompok dalam menggunakan sumberdaya di wilayah tersebut². Dalam konteks Sasi di Kaimana, ketua fam memberlakukan pelarangan (Sasi) atas kegiatan penangkapan teripang, kerang lola dan batulaga di wilayah petuanannya hingga tiba saatnya Sasi dibuka dan komoditas boleh kembali dipanen. Adapun zonapetuanan yang diberlakukan Sasi Laut meliputi zona pasang-surut, dalam bahasa lokal disebut *meti*, hingga bebatuan atau *rep*.

Disparitas Kekuasaan antara Elit Fam (Pemilik Petuanan) dan Non-elit Fam

Kepenguasaan petuanan oleh kelompok-kelompok fam menunjukkan bahwa akses terhadap identitas sosial (*access to social identity*³) menjadi faktor utama yang mempengaruhi seseorang untuk meraih keuntungan dari sumberdaya. Ribot dan Peluso (2003:153) mendefinisikan akses sebagai *"the ability to derive benefits from things"* dengan penekanan pada *ability* atau *power* (kekuasaan). *Bundle of power* dikuasai oleh aktor-aktor berbeda dan memungkinkan mereka, bukan hanya untuk mengambil keuntungan dari sumberdaya, namun juga untuk mengelola dan mengontrol akses yang dimilikinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan kekuasaan yang dimiliki antara elit fam dengan anggota fam (non-elit) telah memungkinkan terjadinya internalisasi berbagai komponen sejalan dengan kepentingan aktor dengan kekuasaan yang lebih besar. Perbedaan kekuasaan antara elit fam dan anggota fam (non elit) dalam praktek Sasi ini dijabarkan dalam Tabel 1.

Skema tersebut menunjukkan bahwa penggunaan kekuasaan (*power exercise*) oleh elit-fam telah memungkinkannya

2 Mengacu pada definisi *common pool resource* Ostrom dan Hess (2007)

3 Konsep ini mengacu pada Teori Akses Ribot dan Peluso (2003)

Tabel 1. Perbandingan *Bundle of Powers* Elit Fam dan Non Elit Fam Dulu dan Kini

Aktor	<i>Bundle of Powers</i>
Elit Fam	Dulu:
	1. Menentukan waktu buka/tutup Sasi
	2. Membuka/menutup Sasi
	3. Menentukan alat tangkap yang digunakan
	4. Melakukan penangkapan ketika buka Sasi
	Kini:
1. Menentukan waktu buka/tutup Sasi	
2. Membuka/menutup Sasi	
3. Menentukan alat tangkap yang digunakan	
4. Melakukan penangkapan ketika buka Sasi	
5. Melakukan lelang buka Sasi kepada tengkulak	
6. Memilih tengkulak yang mendapat hak panen dari buka Sasi	
Anggota Fam (non-elit)	Dulu:
	1. Meminta kepada ketua fam untuk membuka/menutup Sasi
	2. Melakukan penangkapan ketika buka Sasi
	Kini:
	Melakukan penangkapan ketika buka Sasi

Sumber: Penelitian Lapangan Nov-Des 2015

menambah komponen baru dalam Sasi, yaitu sistem lelang. Sistem lelang dilakukan dengan mengumumkan bahwa Sasi akan dibuka dan menawarkan hak penuh untuk menampung hasil tangkapan dari wilayah petuanan kepada tengkulak yang bersedia membayar dimuka. Sebagai konsekuensinya, masyarakat yang menangkap di wilayah petuanan tersebut tidak boleh menjual hasil tangkapannya kepada tengkulak lain. Hal ini semakin menegaskan bahwakini porsikekuasaan elit fam dalam hal penentuan kapan Sasi akan dibuka, dilelang dan siapa yang dapat memenangkan lelang tersebut menjadi lebih besar, sejalan dengan semakin berkurangnya kekuasaan yang dimiliki oleh non-elit fam dalam hal penentuan buka/tutup Sasi. Meski pada hakikatnya wilayah petuanan adalah milik fam, namun karena besarnya kekuasaan yang dimiliki oleh ketua/elit fam, sebutan 'pemilik petuanan' menjadi lebih populer bagi ketua/elit fam yang mengatur wilayah petuanan tersebut.

Dahulu anggota fam memiliki *privilege* untuk meminta kepada elit fam untuk membuka Sasi, sehingga secara turun-temurun Sasi telah berperan dalam menjamin kehidupan masyarakat di masa-masa sulit (*social security mechanism*⁴). Sasi menjadi ibarat tabungan, dan masa Buka Sasi menjadi masa ketika masyarakat menuai hasil tabungannya. Namun kini *privilege* untuk meminta dan menentukan kapan Sasi dapat dibuka hanya ada pada elit-fam, dan peran Sasi sebagai *social security mechanism* tidak lagi berlaku. Hal ini juga menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan relasi sosial antar anggota petuanan dalam pengelolaan sumberdaya yang diatur melalui Sasi, dari yang dahulu bersifat inklusi, kini menjadi eksklusif. Hall, et al. (2011) menyebut fenomena terekklusinya satu golongan masyarakat oleh golongan masyarakat lain dalam satu wilayah sebagai *intimate exclusion*. Proses ini melibatkan aktivitas akumulasi dan disposisi dalam satu masyarakat

4 Mengacu pada konsep *social security mechanism* von Benda-Beckman dan von Benda-Beckman (1988)

Tabel 2. Perubahan Komponen-komponen Kelembagaan dalam Sasi

Komponen Kelembagaan	Dulu	Kini
Relasi antar anggota fam petuanan dalam pengelolaan SDA	Inklusi	Eksklusi
Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> Selam tradisional (<i>molo</i>) tanpa alat bantu pernafasan Alat bantu: Tombak Kedalaman <20 meter 	<ul style="list-style-type: none"> Selam kompressor Alat bantu: kompressor Kedalaman >20 meter
Peran perempuan dalam kegiatan penangkapan	Dominan, sebagai penyelam tradisional	Kurang dominan, karena ketidakmampuan menggunakan kompressor
Bagi hasil buka Sasi yang untuk pemilik petuanan	Dua buah kerang lola per penyelam	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 500.000 per kompressor Rp. 100.000 per pengambil teripang non kompressor Satu per lima bagian lola per penyelam
Peran Tengkulak	Pembeli hasil tangkapan buka Sasi dari masyarakat melalui mekanisme patron-klien	Pembeli hasil tangkapan Buka Sasi dari masyarakat melalui mekanisme lelang
Sanksi	Adat (diselesaikan secara adat)	Rp. 20.000.000 – 30.000.000 per pelanggaran

Sumber: Penelitian Lapangan November - Desember 2015

bertanggung dan berkerabat, yang berbagi sejarah dan interaksi sosial. Komponen-komponen lainnya yang berubah dalam kelembagaan Sasi di Pulau Adijaya sebagai dampak dari ketimpangan distribusi kekuasaan tersebut disajikan dalam Tabel 2.

Teknologi dan Eksklusi Perempuan dari Kegiatan Penangkapan

Penggunaan kompressor sebagai alat bantu perikanan pada dasarnya telah dilarang oleh pemerintah melalui UU No. 31/2004 juncto UU No. 45/2009 tentang Perikanan, namun masih populer dilakukan oleh masyarakat di banyak wilayah, termasuk Pulau Adijaya. Masyarakat pun menyadari bahaya dari penggunaan kompressor terhadap ekosistem maupun kesehatan, namun hal ini tetap dilakukan untuk memaksimalkan hasil tangkapan. Pemilik petuanan, meski

memiliki wewenang untuk melarang penggunaan alat tangkap yang merusak, namun upaya untuk melakukan pelarangan atas penggunaan kompressor tidak dilakukan, melainkan berupaya mengambil keuntungan dengan menetapkan pungutan sebesar Rp.500.000 untuk setiap kompressor. Nominal ini jauh lebih besar dibanding sebelumnya dimana pungutan yang dikenakan bagi kegiatan penangkapan hanyalah dua buah kerang lola per penyelam.

Penggunaan kompressor juga telah menggeser posisi perempuan dari kegiatan penangkapan. Perempuan-perempuan di Kaimana sejak dahulu dikenal sebagai penyelam handal yang aktif melakukan penangkapan ketika buka Sasi, namun semenjak penggunaan kompressor semakin marak, kegiatan ini menjadi dominasi kaum laki-laki mengingat resiko penyelaman dengan kompressor yang sangat tinggi sehingga perempuan tidak mampu dan seringkali tidak diperbolehkan untuk melakukan penyelaman. Hal ini menunjukkan terjadinya pergeseran dominasi dalam pemanfaatan sumberdaya alam sebagai konsekuensi penggunaan teknologi yang bias gender. Dampaknya, pengetahuan penangkapan tradisional yang dimiliki oleh kaum perempuan kini mulai terkikis, para perempuan tereksklusi dari kegiatan penangkapan. Penggunaan teknologi kompressor juga lebih jauh mengancam kohesivitas masyarakat oleh karena ketimpangan modal/teknologi produksi, mengingat momen buka Sasi selama ini bukan hanya sekedar aktivitas pemanenan komoditas, namun juga momen bagi masyarakat berkumpul dan beraktivitas bersama-sama.

Komersialisasi Sasi dan Pelemahan Kelembagaan Sasi

Peran tengkulak mendapat perhatian yang penting dalam penelitian. Kinseng (2014) menggambarkan dua dimensi relasi pemodal (*merchant*) dengan nelayan pemilik, yaitu dimensi eksploitatif opresif dan patron-klien. Dalam konteks Sasi di Kaimana, tengkulak (*merchant*), setelah membeli Sasi kepada pemilik petuanan, berhak membeli sepenuhnya hasil tangkapan yang diperoleh di wilayah tersebut. Di sinilah eksploitasi terhadap nelayan terjadi, karena dengan berlakunya aturan baru tersebut nelayan tidak memiliki pilihan lain untuk menjual hasil tangkapan, berapapun harga yang ditetapkan oleh tengkulak tersebut. Namun, relasi patron-klien juga berlangsung, karena tengkulak pula yang menyediakan modal penangkapan (bensin dan logistik) di masa buka Sasi, dan kepada tengkulak tersebutlah masyarakat bergantung di masa-masa sulit. Satria (2002) menyebut ini sebagai konsekuensi dari ketersediaan kondisi sumberdaya pesisir yang penuh ketidakpastian, sehingga ikatan patron-klien menjadi institusi jaminan sosial untuk menjamin kegiatan perikanan yang dilakukan oleh masyarakat.

Penerapan sistem lelang Sasi oleh pemilik petuanan dapat mengancam relasi patron-klien yang telah terbangun antara nelayan dengan tengkulak, sehingga kedepannya berpotensi hanya relasi eksploitasi saja yang tersisa. Pemilik petuanan melakukan eksploitasi melalui upaya memaksimalkan hasil dengan menerapkan sistem lelang atau sistem bayar dimuka (sebelum penangkapan dilakukan) kepada tengkulak. Sementara tengkulak dihadapkan dengan ketidakpastian produksi dan ketidakpastian penjualan, ongkos produksi yang semakin mahal,serta mendapat peluang untuk memonopoli harga beli, sehingga titik akhir dari rantai eksploitasi ini akan berujung di nelayan. Di sisi lain, nelayan yang telah membangun relasi dengan tengkulak lain pun terancam kehilangan patron-nya akibat pengaturan penjualan hasil Sasi pada tengkulak pemenang lelang yang diterapkan oleh pemilik

Tabel 3. Perubahan Komponen Fundamental Sasi

Komponen Fundamental Sasi	Dulu	Kini
Orientasi	Ekologi: Keberlanjutan sumberdaya komunal dan stabilitas sosial	Ekonomi: Akumulasi kemakmuran pribadi
Surplus Produksi	Dibagi di dalam komunitas	Diakumulasi dalam rumah tangga elit/ pemilik petuanan
Basis Legitimasi	Pemahaman; Pengakuan; Dukungan budaya (Sukarela)	Sanksi Moneter (Koersi)

Sumber: Penelitian Lapangan November - Desember 2015

petuanan. Perubahan komponen mendasar dalam kelembagaan Sasi ini digambarkan dalam Tabel 3.

Penerapan sistem lelang, bagi hasil Sasi yang semakin besar, hingga pemberian izin bagi penggunaan kompressor yang dilakukan oleh elit petuanan mengindikasikan terjadinya pergeseran orientasi penyelenggaraan Sasi, dari orientasi keberlanjutan sumberdaya komunal dan stabilitas sosial, menjadi orientasi akumulasi kemakmuran pribadi elit petuanan. Sasi menjadi suatu praktek ekonomi komersil, yang meski masih bersifat lokal dan tradisional, namun tidak lagi arif. Peran petuanan dalam menjaga keberlanjutan sumberdaya hayati semakin melemah, sehingga Sasi yang sebelumnya berguna sebagai sarana pemerata surplus dengan terjaganya sumberdaya komunal kini tidak lagi berlaku. Hal ini kemudian berimplikasi pada semakin lemahnya legitimasi yang dimiliki oleh otoritas lokal (pemilik petuanan) dalam penegakan peraturan Sasi. Sasi dahulu merupakan suatu praktek adat dengan basis legitimasi pemahaman bersama, pengakuan dan dukungan budaya (mekanisme sukarela). Kini dengan semakin lemahnya legitimasi tersebut, penegakan Sasi menjadi dilengkapi dengan sanksi moneter (mekanisme koersi) bagi setiap pelanggaran. Namun ironisnya, dengan penerapan sanksi yang semakin berat tersebut, kontrol sosial bagi penegakan Sasi justru semakin melemah. Hal ini sekaligus menjadi indikasi bagi apa yang disebut oleh Scott (1985) sebagai *weapons of the weak: everyday forms of resistance*. Masyarakat kelas bawah memiliki cara-cara tersendiri dalam menanggapi dominasi, bukan hanya berfokus pada pemberontakan tetapi pada bentuk perlawanan budaya dan ketidak-kooperatifan yang dilakukan dari waktu ke waktu secara persisten.

Foucault (1982) juga menyebutkan bahwa *power* dapat diwujudkan melalui dua instrumen, yaitu kesepakatan (*consent*) atau kekerasan (*violence*). Ketidak-kooperatifan yang dilakukan pasca penegakkan peraturan Sasi secara koersif menunjukkan bahwa *power* bukan hanya dimiliki oleh elit petuanan, namun juga dimiliki oleh non-elit petuanan dan dapat berdampak pada runtuhnya legitimasi Sasi sebagai penyelenggara praktek pengelolaan sumberdaya laut tradisional. Komersialisasi yang dilakukan oleh petuanan – sebagai *power exercise* oleh elit petuanan – mendorong peningkatan terjadinya aktivitas pencurian secara terselubung yang kedepannya dapat berpotensi untuk dilakukan secara massal. Pada beberapa kasus, modus pencurian dilakukan

oleh oknum masyarakat dengan mengambil hasil di wilayah petuanan yang masih tutup Sasi, ketika masyarakat yang lain berkumpul di wilayah buka Sasi, sehingga hasil curian menyaru dengan hasil panen yang dihasilkan di wilayah lain yang sedang buka Sasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Fahrnunisa *et al.* (2015) menyebutkan bahwa dalam memahami permasalahan pada komunitas pesisir, tidak cukup hanya terkonsentrasi pada isu-isu kelautan, melainkan juga pada kegiatan ekonomi masyarakat non-maritim. Kebutuhan ekonomi yang meningkat dan upaya elit dalam mengakumulasi kemakmuran dari surplus sumberdaya alam, dalam konteks Sasi di Kaimana, juga telah bertindak sebagai suatu pemicu perubahan dominan dalam penyelenggaraan praktek pengelolaan sumberdaya laut tradisional, yang tidak sepenuhnya terkait pada isu kelautan namun berperan penting dalam mempengaruhi kesejahteraan hidup masyarakat pesisir. Jika disimpulkan secara keseluruhan, kelembagaan Sasi mengalami perubahan yang substansial sebagai akibat dari pengaruh:

- 1) Pergeseran orientasi penyelenggaraan Sasi, dari orientasi ekologi (menjaga sumberdaya hayati) menjadi orientasi ekonomi (memaksimalkan keuntungan).
- 2) Pengalihan surplus produksi yang sebelumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan komunal dan menjaga kohesivitas di dalam masyarakat, kini menjadi digunakan untuk kemakmuran rumah tangga elit petuanan.
- 3) Perubahan teknologi penangkapan, dari yang sebelumnya selam tradisional dengan alat bantu tombak di kedalaman kurang dari 20 meter, berganti menjadi selam kompressor dengan kedalaman yang jauh lebih dalam.
- 4) Sanksi yang dimonetisasi, penerapan sistem bagi hasil yang merugikan nelayan, dan sistem lelang, yang berujung pada komersialisasi Sasi, terkisinya legitimasi otoritas adat hingga pelemahan Sasi sebagai institusi pengelola sumberdaya.

Adapun keempat perubahan komponen substansial ini menyebabkan terjadinya dua fenomena penting, yaitu:

- 1) Perubahan dominasi pelaku penangkapan komoditas di masa buka Sasi, dari dominasi perempuan menjadi dominasi laki-laki.
- 2) Hilangnya *social security mechanism* oleh karena hilangnya inklusivitas pengelolaan sumberdaya alam, menjadi eksklusif yang dilakukan oleh elit lokal dalam rangka memaksimalkan keuntungan dari buka Sasi.

Saran

Heraclitus, seorang filsuf yang hidup di abad keenam sebelum masehi, pernah berkata “tidak ada seorang pun yang dapat melangkah dua kali ke dalam sungai yang sama”, sebuah ungkapan yang pada dasarnya menggambarkan bahwa segala hal di dunia ini selalu berubah dan tidak satu hal pun yang tetap sama. Perubahan orientasi pemanfaatan sumberdaya alam dalam dinamika sistem kelembagaan Sasi sebagaimana disajikan dalam artikel juga seyogyanya dapat dilihat sebagai bagian integral dari perubahan yang selalu terjadi dalam kehidupan. Terlepas dari pelemahan yang terjadi pada institusi Sasi sebagai pengelola sumberdaya alam secara tradisional, keberadaannya masih penting untuk dipertahankan namun dengan serangkaian proses transformasi.

Sasi berpotensi mengontrol ketersediaan sumberdaya, mencegah terjadinya praktek perikanan yang destruktif, dan juga merupakan suatu kelembagaan pengelola sumberdaya komunal yang berperan dalam menjaga kohesivitas sosial. Transformasi yang dilakukan baiknya dapat memetakan permasalahan mendasar yang terjadi serta menempatkan keutuhan komunitas dalam basis pelaksanaannya.

Salah satu bentuk transformasi Sasi yang dapat dilakukan adalah dengan melibatkan peran kelembagaan ekonomi kreatif, sehingga upaya masyarakat untuk keluar dari kemiskinan tidak bertabrakan dengan agenda konservasi sumberdaya alam. Benih-benih kelembagaan ekonomi lokal non-ekstraktif, seperti pariwisata alam misalnya, perlu didukung dan dikembangkan. Kolaborasi dengan NGO lingkungan dapat dioptimalkan dalam hal penguatan kapasitas masyarakat di bidang kewirausahaan, sehingga masyarakat pun dapat lebih proaktif dalam mendukung program penyelamatan lingkungan yang dilakukan. Kedepannya penyusunan kembali pola-pola pengaturan (kelembagaan) pengelolaan sumberdaya komunal yang adil juga perlu diinisiasi agar ketimpangan kekuasaan yang terjadi di masyarakat dapat dipersempit, kohesivitas dapat kembali terbangun, dan pengelolaan sumberdaya komunal yang berkelanjutan dapat dilakukan dengan semangat kebersamaan.

Ucapan Terima Kasih

Penelitian ini diselenggarakan berkat hibah penelitian dari *Community Conservation Research Network (CCRN)* yang didanai oleh *Social Sciences and Humanities Research Council of Canada* dan berlokasi di Saint Mary's University, Kanada. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada *Conservation International (CI)* Kaimana dan masyarakat Kaimana, khususnya Desa Adijaya atas dukungan yang diberikan selama masa penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhuri DS. 2013. *Selling the Sea, Fishing for Power: A Study of Conflict over Marine Tenure in Kei Islands, Eastern Indonesia*. AU: ANU E Press
- Allen GR, Erdmann MV. 2009. Reef Fishes of the Bird's Head Peninsula, West Papua, Indonesia. *Check List*, Vol. 5/3, pp. 587-628
- Babbie E. 2010. *The Practice of Social Research: Twelfth Edition*. Belmont, US: Wadsworth
- Boli P, Yulianda F, Damar A, Soedharma D, Kinseng R. 2014. Benefits of Sasi for Conservation of Marine Resources in Raja Ampat, Papua. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, Vol. 20/2, pp. 131-139
- Cohen PJ, Foale SJ. 2013. Sustaining Small Scale Fisheries with Periodically Harvested Marine Reserves. *Marine Policy*, Vol. 37, pp. 278-287
- [CI] Conservation International. 2009. *Regional Profile: Indonesia Bird's Head Seascape 2001-2009*. CI
- Fahrnunisa, Azhar H, Muswar HS, Miharja HA, Fahmi A. 2015. Dilema Agraria Pesisir (Studi Kasus Masyarakat Pesisir Dusun Ujung Genteng Kabupaten Sukabumi). *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* Vol. 3/3, pp. 110-113
- Foucault, Michel. 1982. The Subject and Power. *Critical Inquiry*, Vol. 8/4, pp. 777-795
- Hall D, Hirsch P, Li TM. 2011. *Powers of Exclusion: Land Dilemmas in Southeast Asia*. Singapore: NUS Press
- Harkes I, Novaczek I. 2002. Presence, performance, and institutional resilience of sasi, a traditional management

- institution in Central Maluku, Indonesia. *Ocean & coastal management*, Vol.45/4, pp. 237-260
- Huberman AM, Miles MB. 2009. Manajemen Data dan Metode Analisis. *Handbook of Qualitative Research* (Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, Eds.). Yogyakarta (ID): Pustaka Pelajar
- Kinseng RA. 2014. Konflik Nelayan. Jakarta (ID): Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Knight J. 1992. Institutions and Social Conflict. NY: Cambridge University Press
- Mantjoro E. 1996. Traditional Management of Communal-Property Resources: the Practice of the Sasi System. *Ocean & Coastal Management*, Vol. 32/1, pp. 17-37
- McLeod E, Szuster B, Salm R. 2009. Sasi and Marine Conservation in Raja Ampat, Indonesia. *Coastal Management*, Vol.37/6, pp. 656-676
- Mony A. 2015. Ekologi Politik Pengelolaan Sumberdaya Pesisir: Studi Kasus Relasi Kuasa Pengelolaan Sasi Laut di Pulau Haruku. *Tesis*. Sekolah Pascasarjana Insitut Pertanian Bogor
- Ostrom E, Hess C. 2007. Private and Common Property Rights. Workshop in Political Theory and Policy Analysis, Indiana University
- Peluso NL, Vandergeest P. 2001. Genealogies of the Political Forest and Customary Rights in Indonesia, Malaysia and Thailand. *The Journal of Asian Studies*, Vol. 60/3, pp. 761-812
- Ribot JC, Peluso NL. 2003. A Theory of Access. *Rural Sociology*, Vol.68/2, pp. 153-181
- Satria A. 2002. Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir. Jakarta (ID): Pustaka Cidesindo
- Scott, JC. 1985. Weapons of the weak: everyday forms of resistance. New Haven and London: Yale University Press
- Vayda AP. 1983. Progressive Contextualization: Methods for Research in Human Ecology. *Human Ecology*, Vol. 11/3, pp. 265-281
- von Benda-Beckmann F, von Benda-Beckmann K. 1988. Social Security: Between Past and Future: Ambonese Networks of Care and Support. Berlin: Lit verlag
- von Benda-Beckmann F, von Benda-Beckmann K, Brouwer A. 1992. Changing "Indigenous Environmental Law" in the Central Moluccas: Communal Regulation and Privatization of Sasi. Paper presented to the Congress of the Commission on Folk Law and Legal Pluralism at Victoria University, Wellington, August 1992
- Zerner C. 1994. Through a green lens: The construction of customary environmental law and community in Indonesia's Maluku Islands. *Law and Society Review*, Vol. 28/5, pp. 1079-1122